

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Aries Djaenuri dan Enceng, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011)

Arya Utama, I Made, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007).

Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010).

Ateng dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*. (Alumni, 2010).

Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. IX, 1988).

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2020).

DPMPTSP Aceh, *Laporan Hambatan Penanaman Modal di Aceh 2022*, (Aceh: CV. Three Power System, 2022).

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).

Hartono, Adrian, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

- HR, Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), halaman 201-202.
- Indrati, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), halaman 108.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2009), halaman 218.
- Kusumahamidjojo, Budiono, *Ketertiban Yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 1999).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1945).
- Ngani, Nico, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemeirntahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007).
- Nurcholis, Hanif, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008).
- Prasojo, Eko, *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009).
- Prins, W.F, *Pengantar Ilmu Hukum Adminsitasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).
- Sadjijono, *Memahami Berberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara Laks Bang*. (Jakarta: Pressindo, 2008).

- Safill, Ema, *Pertambangan dalam Keterlanjutan Pembangunan, dalam Ratusan Bangsa Merosak Satu Burri*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Sahya Anggara dan Ii Sumantri, *Adminisrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018).
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta: UII Pres, 2004).
- Salman, Otje, *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009).
- Siagian, Sondang, *Administrasi Pembangunan; Konsep Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Sri, Yohanes Pudyatmoko, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. (Jakarta: Grasindo, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980).
- Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan; Konsep Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- S Siagian, *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: PT Gunung Agung, 1987).
- Sumaryadi, I Nyoman, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Utama, 2005).
- Susila, M. Endriyo, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) halaman 35.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Thalib, Sajuti, *Hukum Pertambangan*, (Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974).

Tn Ratnawah, dkk., *Hubungan Kewenangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah di Indonesia: Peluang, Kendala dan Implikasi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik UPI, 2003).

Tri Ratnawati, dkk., *Hubungan Kewenangan Antera Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Otonomi Deerah di Indonesia: Peluang, Kendala, dan Implikasi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik UPI, 2003).

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah* dalam Sulistyowati irianto dan Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

W.F Prins, *Pengantar Ilmu Hukum Adminsitasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

Jurnal

Dordia, Zsazsa, Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, (Vol. 10, No. 1, 2021), halaman 167-182.

- Estefania dkk, Analisis Pertumbuhan PDB Indonesia Melalui Pengembangan Sektor Pertambangan, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, (Vol. 2.No. 5, 2021), halaman 756-765.
- Haris, Syamsuddin, Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah Ke Arah Format Otonomi Daerah Masa Depan, *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, (No.3, 2001), halaman 78-79.
- M Alhudhori, Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, (Vol. 1, No. 1, 2017), halaman 113-124.
- Matius Ade Krispian Soba Nono dkk, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Usaha Pertambangan Galian C Di Kabupaten Ngada, *Jurnal Interpretasi Hukum*, (Vol. 1, No. 2, 2020), halaman 138-141.
- Robert Arthur Simanjuntak, Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia, *Majalah Prisma*, (Vol.29, No.3, 2010), halaman 138-141.
- Mawuntu, J. Ronald. Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum Unsrat*, (Vol. 20, No. 3, 2012), halaman 11-21.
- Nurdin, Adamy, Pengaruh Hubungan Kekuasaan Antara Pusat dan Daerah Terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara", *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Vol. 1, No. 2, 2021), halaman 553-570.

Rizkyana Zaffrinda Putri dan Lita Tyesta, “Kajian Politik Hukum Tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Law Reform*, Vol. 11, No. 2, 2012, halaman 205.

Saleng, Abrar, *Risiko-risiko dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)*, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Vol. 26, No. 2, 2007), halaman 5.

Sanjaya, Wiliam, Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 2, No.3, 2015), halaman 584-597.

Laman Internet

Admin DPMPTSP Aceh, “*Pemerintah Aceh Tunda Penerbitan IUP*”, (DPMPTSP Aceh, 7 Februari 2023), halaman I.

Admin Kantor Staf Presiden, “*Cegah Pertambangan Liar, KSP Dorong Perbaikan Sistem Perizinan Berusaha Sektor Minerba*”, (Kantor Staf Presiden, 07 November 2022), halaman I.

Admin Ombudsman RI, “*Ombudsman Sampaikan Temuan Aktivitas Pertambangan Ilegal*”, (Ombudsman, 2020), halaman I.

Admin Ombudsman RI, “*Koordinasi Penanganan Laporan Masyarakat Sektor Pertambangan*”, (Ombudsman, 22 Desember 2022), halaman I.

Admin PUSHEP, “*Pentingnya Pengaturan Pelibatan Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Minerba*”, (PUSHEP.or.id, 2020), halaman I.

Al Hikam, Hardi Alif, “*Rezeki Emang Nggak ke Mana! RI Ketiban Durian Runtuh dari Harga Batu Bara*”, (detik Finance, 8 Maret 2020), halaman I.

Indah Cintia dkk, *“Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah”*, (Researchgate, Mei 2018), halaman V.

Mudassir, Rayful, *“Harga Baru Bara Meningkat, Penerimaan Negara dari Pertambangan Sudah Lewati Target”*, (Ekonomi Bisnis, 6 September 2021), halaman I.

Natalia, Widia, *“Kadis ESDM Vent Christway: Perpres 55 Tahun 2022 Meskipun Tidak Sepenuhnya Akomodir Kepentingan Daerah, Namun Berpeluang Tingkatkan PAD”*, (Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah, 14 Juni 2022), halaman I.

Pribadi, *“Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba”*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 18 April 2022, halaman I.

Rizki, Mochamad Januar, *“Memahami Izin Pertambangan Pasca Terbitnya UU Minerba dan UU Cipta Kerja”*, (Hukum Online, 25 Februari 2022), halaman I.

Setiawan, Verda Nano, *“Pemda Dapat Delegasi Perizinan Tambang, Sudah Siap?”* CNBC Indonesia, 18 April 2022, halaman I.

Siti Masitoh, *“Ekonom Sebut Kenaikan Harga Batubara Bisa Berdampak Baik Bagi Ekspor Indonesia”*, (Nasional Kontan, 02 Maret 2023), halaman I.

Tolok, Aprianus Doni, *“Presiden Jokowi Cabut Ribuan Izin Perusahaan Tambang, Ini Alasannya!”*, (Ekonomi Bisnis, 6 Januari 2022), halaman I.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak
Pertambangan

Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Indische Mijn Wet 1899

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara Angka 19 Lampiran Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Lainnya

Ismoyo, Jarot Digdo, *“Politik Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan UUD 1945 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial”*, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018).

Parsa, I Wayan, *Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah Bagi Anggota DPRD Merauke Papua, Fakultas Hukum, Seni dan Ilmu Sosial, Universitas Udayana, 2020).

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Susmiyati, Haris Retno, *“Nilai Manfaat Pertambangan Batu Bara Di Kawasan Hutan Dalam Perspektif Hukum Sumber Daya Alam”*, (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2017).

Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum,
(Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2015).